

Representasi Hubungan Sipil-Militer Pasca Orde Baru pada Film Autobiography

Muhammad Nuzul Adri¹, Syamsuddin Azis², Alem Febri Sonni³

¹⁻³Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin Makassar

Email: muhnuzuladri@gmail.com

Diterima : 23 November 2024

Disetujui : 18 Januari 2025

Diterbitkan : 15 Februari 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis representasi hubungan sipil-militer pasca orde baru yang terdapat dalam film *Autobiography*. Lebih lanjut, peneliti membedah dampak warisan kultural orde baru yang terlihat dalam film tersebut. *Autobiography* adalah film thriller politik pertama setelah reformasi yang merefleksikan kekuatan militer dalam kehidupan sosial politik kontemporer yang masih hegemonik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan konsep codes of television John Fiske. Melalui penelitian ini diketahui bahwa film ini merepresentasikan dampak dominasi militer di tiga tingkatan: reality, representation, dan ideology. Pada tingkat reality, atribut militer dan perilaku tokoh Purna menegaskan posisinya sebagai otoritas dominan. Pada tingkat representation, teknik sinematik seperti pencahayaan dan dialog membangun suasana tegang yang mencerminkan kontrol psikologis militer atas sipil. Selanjutnya, tingkat ideology, narasi film mengungkapkan ketimpangan kekuasaan dan warisan otoritarian masa lalu yang masih memengaruhi struktur sosial dan politik Indonesia.

Kata Kunci: film autobiography, militer, relasi sipil-militer, semiotika

Abstract

This study analyzes the representation of civil-military relations in the post New Order era as depicted in the film *Autobiography*. Furthermore, the researcher examines the impact of New Order cultural legacies evident in the film. *Autobiography* is the first political thriller film after the Reformasi era to reflect the enduring hegemonic influence of military power in contemporary socio-political life. The researcher employs a qualitative-descriptive approach and John Fiske's codes of television concept. The study reveals that the film represents the impact of military dominance across three levels: reality, representation, and ideology. At the reality level, military attributes and the behavior of the character Purna affirm his position as a dominant authority. At the representation level, cinematic techniques such as lighting and dialogue create a tense atmosphere that reflects the military's psychological control over civilians. Finally, at the ideology level, the film's narrative exposes power imbalances and the authoritarian legacies of the past, which continue to influence Indonesia's social and political structures.

Keywords: autobiography film, military, civil-military relations, semiotics

PENDAHULUAN

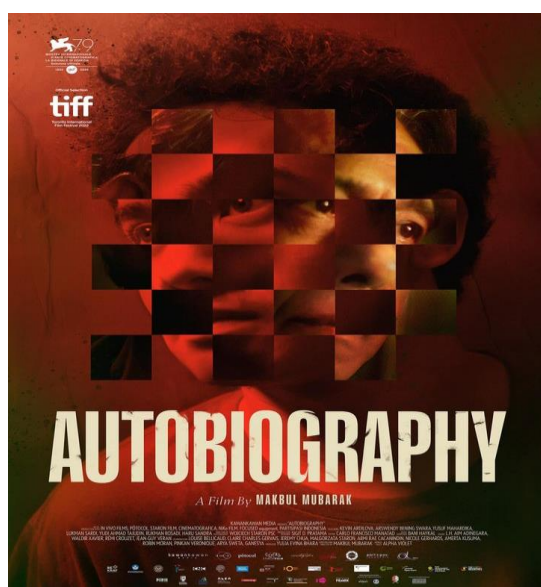
Pada awalnya sinema atau film adalah hiburan kelas bawah perkotaan tetapi dalam perkembangannya yang begitu cepat sehingga dapat menjangkau segala segmen kelas sosial dan berpotensi mempengaruhi persepsi khalayak luas (Irawanto, 2017). Dampak film terhadap penontonnya, sedikit banyak berhasil mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat setelah menonton film. Dalam sejarah perfilman Indonesia, Militer berperan penting menyebarkan hegemoni militerisme di ranah kebudayaan populer ini. Semenjak periode reformasi bergulir dua dekade lampau, pengaruh militer khususnya angkatan darat di lapangan sosial, politik dan kebudayaan populer belum hilang sepenuhnya kendati dwifungsi ABRI telah dihapus dan tentara dilarang berpolitik praktis.

Hubungan sipil-militer di Indonesia pasca orde baru merupakan topik yang menarik untuk dikaji dalam konteks transisi demokrasi kontemporer. Transformasi ini tidak hanya berimplikasi pada struktur kekuasaan, tetapi juga pada konstruksi budaya yang merefleksikan hubungan sipil-militer, salah satunya melalui medium film. Berbagai penelitian sebelumnya telah menganalisis bagaimana film merepresentasikan hubungan sipil-militer yang tidak setara (Ashrianto, 2016; Budiman, 2018; Budiman et al., 2019; Budiman & Sofianto, 2018; Irawanto, 2017, 2020; Nafisha et al., 2023; Yuliasuti, 2023). Budi Irawanto (2020) berpendapat bahwa film pada masa orde baru seringkali digunakan untuk menegaskan narasi nasionalisme yang sarat dengan legitimasi kekuasaan militer. Selanjutnya, penelitian oleh Panji Dwi Ashrianto (2016) juga mengungkapkan bagaimana film “Janur Kuning” menjadi media efektif untuk melegitimasi ideologi Soeharto.

Pendekatan semiotika yang digunakan membuktikan bahwa film dapat menjadi alat untuk membangun citra kekuasaan yang hegemonik. Di sisi lain, dalam konteks pasca orde baru, studi oleh (Budiman et al., 2019) tentang maskulinitas tentara di film “Doea Tanda Cinta dan I Leave My Heart in Lebanon” menunjukkan bahwa representasi tentara mulai lebih dinamis, memperlihatkan perubahan dalam paradigma maskulinitas dan hubungannya dengan kajian sipil-militer. Namun, terdapat celah dalam penelitian sebelumnya terkait representasi hubungan sipil-militer dalam sinema pasca orde baru. Penelitian yang mengaitkan representasi ini dengan dinamika demokratisasi dan transformasi kekuasaan di Indonesia masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan interdisipliner yang memadukan kajian film, militer dan studi komunikasi. Selain itu, celah ini membuka peluang untuk dianalisis secara komprehensif terkait representasi hubungan sipil-militer dalam sinema kontemporer termasuk pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat.

Peneliti berupaya mengisi celah penelitian tersebut dengan menggali bagaimana perihal film terutama film alternatif dapat menciptakan narasi yang berpusat dari realitas. Dalam studi yang akan dikaji, peneliti berargumen bahwa representasi hubungan sipil - militer dalam film dapat mencerminkan dinamika sosial-politik yang kompleks termasuk legitimasi kekuasaan dan kritik otokritik terhadap *pelanggaran* wacana militerisme. Ditemukan bahwa pola hubungan sipil-militer bukan sesuatu yang statis, bangkrutnya orde baru tidak serta merta dampak sosial kulturalnya hilang begitu saja. Peneliti menemukan signifikansi tanda-tanda (*codes*) yang relevan dengan menggambarkan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Sekalipun fiksi, film “Autobiography” berpijak terhadap realitas masyarakat pada umumnya dan digarap secara natural dan menegangkan. Menurut peneliti, film ini patut diapresiasi. Memori traumatis masyarakat sipil terhadap rezim masa lalu dapat dijumpai dalam kehidupan sosial politik Indonesia kontemporer kendati otoritarianisme telah digulingkan 1998. Mayoritas *civil society* masih terkooptasi *mindset* dan kultur orde baru dan secara psikologis gejala tersebut kemudian ditransmisikan kepada generasi muda melalui karakter tokoh (Rakib). Sebaliknya, tokoh (Purna) merepresentasikan simbol kekuatan lama (orde baru) yang beradaptasi dengan masyarakat sipil di tengah iklim demokrasi. Hasilnya kedua tokoh tersebut merepresentasikan pertentangan antar dua generasi yang berbeda di ruang privat dan ruang publik dan berelasi dengan praktek militerisme sebagai warisan politik kebudayaan dalam arsitektur demokrasi kontemporer Indonesia.



Gambar 1. Poster Film Autobiography (sumber: crew-united.com)

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori “*social codes*” John Fiske. Studi tentang kode (*codes*) menekankan pada dimensi sosial komunikasi yang meorganisasikan tanda (*signs*). Sistem tersebut dijalankan oleh aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat yang menggunakan kode tersebut (Fiske, 2004). Dalam pertukaran makna, komunikasi bekerja dalam sistem bahasa dan budaya suatu masyarakat. Pada praktiknya, teks film dapat membongkar pesan tersembunyi yang terkandung dalam film. Pada dasarnya, semiotika mempelajari tentang tanda dan relasinya dengan tanda-tanda itu bekerja. Semiotika berfungsi melacak interkoneksi antara struktur pesan komunikasi dalam struktur masyarakat. Sebagaimana konvensi sosial yang menitikberatkan pada tanda, semiotika mempelajari tanda “*signs*” sebagai suatu hal yang merujuk pada benda lain (Sobur, 2017). Ahli semiotika lainnya, Saussure, mengartikulasikan teori linguistik dalam semiotika melalui penanda dan petanda. Sifat arbitrer tanda merupakan inti bahasa manusia meskipun tak ada relasi pasti antara penanda dan petanda. Prinsipnya, keduanya saling berkaitan berdasarkan konvensi dan kesepakatan dalam komunikasi (Fanani, 2013). Dengan begitu, pendekatan saussurean sangat beririsan dengan kode-kode semiotika John Fiske tentang “*the codes of*

television". Tujuan semiotika John Fiske adalah untuk menemukan identifikasi sosial yang terkodifikasi melalui film yang dibuat oleh sutradara.

Oleh sebab itu, kajian semiotika dapat dijadikan instrumen untuk membongkar praktik ideologi dalam teks film. Fiske dalam teorinya "*social codes*" meneliti televisi dengan menggunakan metode "*the codes of television*", Fiske membagi tiga tingkatan untuk memahami kode-kode sosial yang ditayangkan dalam acara televisi (Fiske, 2005; Turner, 2022). John Fiske (1987) menjelaskan bahwa kode televisi adalah sistem tanda yang diatur oleh seperangkat aturan. Aturan dan konvensinya dibagikan di antara anggota suatu budaya dan digunakan untuk menyebarkan makna bagi kebudayaan tersebut. Berikut tingkatan kode-kode sosial yang dimaksud Fiske. Level pertama, *Reality*, terdiri dari penampilan, pakaian, tata rias, lingkungan, perilaku, ucapan, gerak tubuh, ekspresi, suara, lainnya. Tahapan selanjutnya dikodekan secara elektronik melalui *technical codes* yang terdapat di level kedua. Berikutnya level kedua, *representation*, kamera, pencahayaan, *editing*, musik dan suara. Kemudian ditransmisikan melalui *conventional representational codes* yang direpresentasikan dalam bentuk narasi, konflik, karakter, aksi, dialog, *setting*, dan aktor. Level ketiga, *ideology*, terbentuk secara koheren dan diterima secara sosial melalui *ideological codes* seperti individualisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, kapitalisme dan sebagainya (Fiske, 1987).

Ketiga tingkatan kode sosial dalam tayangan televisi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis film dan mengidentifikasi pertandaan yang berelasi dalam tatanan ideologi. Ideologisasi beroperasi melalui pesan-pesan tersembunyi yang terbangun dan direpresentasikan masing-masing karakter dalam film. Teori ini dikemukakan oleh Louis Althusser yang melihat praktik ideologi bekerja dalam menjaga kekuasaan minoritas atas mayoritas melalui aparatus kekerasan negara (Althusser, 2015). Dalam penyebarluasannya, konstruksi ideologi dominan melibatkan kelompok subordinat dalam praktiknya dan menginjeksi kesadaran palsu untuk mengkonstruksi identitas sosial dan melawan kepentingan-kepentingan sosial mereka sendiri (Fiske, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan sipil-militer pasca orde baru direpresentasikan dalam film. Memusatkan pada narasi, visualisasi, simbol-simbol dan tanda-tanda (*codes*) yang digunakan untuk menyampaikan dinamika tersebut. Penulis juga berusaha untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang menunjukkan kontrol militer, konflik yang terjalin, dan aspek marginalisasi peran sipil dalam realitas keseharian. Melalui analisis semiotika John Fiske, studi penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai warisan kultural rezim otoritarian orde baru yang masih berpengaruh dalam ruang domestik dan dampaknya di pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang hubungan sipil - militer dan peran budaya populer, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap studi komunikasi dan kajian film. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran sinema dalam merepresentasikan dan merefleksikan proses demokratisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotika. Penelitian kualitatif adalah formula untuk memahami makna yang dilakukan individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data dikumpulkan dalam pengaturan partisipan dan dianalisis secara induktif yang dibangun dari tema khusus ke tema umum dan peneliti kemudian menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan (Creswell & Creswell, 2017).

Teknik analisisnya menggunakan Semiotika John Fiske. sebagai disiplin ilmu dapat digunakan menganalisis film seperti narasi, karakter, gambar, teks, dan adegan film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Memaknai berarti objek tidak hanya membawa informasi atau berkomunikasi tetapi juga membuat sistem terstruktur dari tanda yang digunakan dalam film (Mudjiono, 2011). Sumber data penelitian terdiri dari data primer berasal dari objek penelitian sendiri, seperti makna dari setiap potongan *scene*, teknik sinematografi, narasi, *setting*, karakter, ucapan, gestur, ekspresi, suara, pencahayaan, dialog, dan kelas sosial yang terdapat dalam sepuluh *scene* serta unsur lainnya. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber lain yang mendukung penelitian diantaranya jurnal, berita *online*, film, buku dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film *Autobiography* pertama kali ditayangkan di bioskop Indonesia pada 19 Januari 2023. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Rakib (Kevin Ardilova) dan pensiunan tentara angkatan darat bernama Purna (Arswendy Bening Swara). Rakib bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Purna yang baru pulang ke kampung halamannya untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Di sebuah rumah besar, teror dan ketakutan bukan datang dari hal-hal mistis tetapi datang dari sosok Purna, mantan jenderal militer era orde baru yang masih memiliki pengaruh sosial politik dan disegani masyarakat (asumsi.co, 2023). “Autobiography” menyajikan realitas sosial masyarakat pedesaan yang ter subordinasi dengan warisan otoriter masa lalu. Film *Autobiography* diproduksi rekan-rekan media, disutradarai oleh Makbul Mubarak sekaligus debut perdananya untuk film panjang dan mendapatkan program pendanaan dari berbagai negara, di antaranya Singapura, Polandia, Jepang, Thailand, Jerman, Perancis, dan Filipina.

Latar cerita Film *Autobiography* pada dasarnya menggambarkan kehidupan masyarakat desa pasca reformasi yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam sistem demokrasi. Warisan kultural orde baru masih kental dan hegemonik dimana kekuatan politik tersentralisasi di kelas sosial terpendang yang dipersonifikasikan oleh Purna. Jika lapisan kelas bawah mencoba melakukan resistensi terhadap otoritas akan mendapatkan hukuman penjara, seperti yang dialami ayah Rakib atau kematian yang dialami Agus. Pada akhirnya film itu bersifat personal dan individualistik yang direpresentasikan oleh Rakib sendiri (deadline.com, 2023).

Dominasi Militer Atas Sipil

Peneliti melakukan analisis secara detail beberapa *scene* yang memperlihatkan praktik dominasi militer dalam tokoh Purna. Mengacu kepada teori *social codes* Fiske, terdapat elemen tanda (*signs*) dan kode-kode ideologis dalam film yang merepresentasikan dampak ideologisasi militer rezim Soeharto yang belum hilang sepenuhnya di tengah hiruk pikuk demokrasi. Berikut adalah analisis peneliti terhadap dominasi militer yang ditampilkan dalam Film *Autobiography*.



Gambar 2. (10:42 – 11:24) *scene* Rakib sedang mengisi bahan bakar sambil berbincang dengan Andri, dari Data Olahan Peneliti, 2024

Rakib : “Andri, tadi aku mau tanya. Besok kamu ada kerjaan gak ?”

Andre : “Belum ada job.”

Rakib : “*Pick up* bapakmu nganggur?”

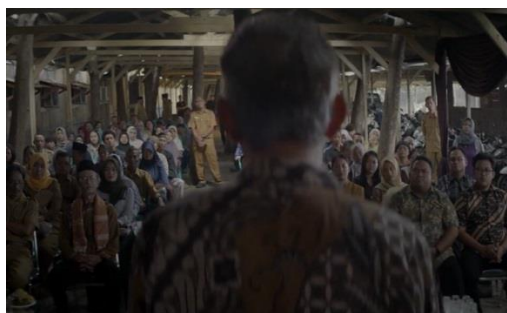
Andre : “Mengangguk”

Rakib : “Bantu aku ya. Pasang spanduk. Nanti ada bayarannya dari Pak Jenderal”

Andre : “Wah, pihak berkuasa. Siapp. Laksanakan.”

Pada dialog ini, Rakib menjelaskan kepada Andre bahwa Pak Jenderal akan mencalonkan diri sebagai bupati dan meminta bantuan masyarakat sipil untuk sama-sama berpartisipasi secara fisik memasang spanduk Purna. Pengaruh Purna sebagai figur perwira militer masih melekat kuat di mata masyarakat sekitar. Identitas militer ini seringkali melekat seumur hidup kendati Purna sudah pensiun secara resmi.

Masyarakat sipil yang ter subordinasi dalam struktur sosial secara tidak langsung mengamini kegiatan politik merupakan bagian dari penguasa dan pemerintah. Dalam rezim orba, populer dengan akronim *de-politisasi* dan peran masyarakat biasa hanya sebatas sebagai objek politik. Di Indonesia, perwira militer sering memiliki peran besar dalam politik dan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengalaman dan latar belakang militer Purna sebagai mantan perwira menjadi sumber legitimasi politiknya dalam pencalonan dirinya sebagai bupati. Permintaan Rakib kepada Andre untuk membantu memasang spanduk menggambarkan keterlibatan sipil dalam mendukung agenda militer tanpa mempertanyakan legitimasi atau konsekuensinya.



Gambar 3. (14:30 – 16:51) *scene* Agus membacakan surat ibunya di sela kampanye Purna, dari Data Olahan Peneliti, 2024

Pada potongan *scene* diatas, Purna sedang berpidato dalam kampanye pilkada dan sosialisasi proyek infrastruktur PLTA. Disela-sela pidato tersebut seorang pelajar SMA, Agus, mengangkat tangan untuk menyampaikan sebuah surat dari ibunya yang tidak bisa hadir di kegiatan tersebut. Isi surat yang dibaca Agus sebagai berikut:

“Kebunku adalah warisan dari keluarga di atas saya, Cuma kopi yang saya ngerti, mohon jangan digusur pak. Saya tidak punya kebun lain. Itulah kenapa saya belum menandatangani kontrak pembebasan lahan dari developer. Mohon dukungan dan pengertian dari bapak. Saya doakan semoga bapak Purnawinata terpilih menjadi bupati dalam pilkada nanti.”

Kemudian surat pernyataan itu dijawab langsung oleh Purna, “Infrastruktur yang baik, akan membuat desa ini, daerah ini, akan menjadi maju.”

Isi surat tersebut merepresentasikan ketidakberdayaan kaum sipil terhadap otoritas penguasa. Secara tidak langsung peran sipil dimarginalisasi sebatas objek politik oleh Purna. Konsep *depolitisasi* masih tumbuh subur dan proyek infrastruktur yang dijalankan pihak penguasa seringkali menimbulkan konflik agraria di masyarakat. Sering kali kaum sipil membutuhkan figur terkuat diluar dirinya untuk melindungi dirinya dari ancaman pembangunan. Kekuatan ini direpresentasikan oleh Purna sebagai kelas dominan. Akronim infrastruktur atau istilah populer sejak masa orde baru, pembangunan, seringkali menjadi program negara yang menyerobot sumber kehidupan warga dan berdampak kepada ketergantungan masyarakat kepada otoritas dominan. Warisan politik ini dapat ditemui di masa pasca-reformasi sekarang ini.

Scene ini juga menegaskan Purna sebagai representasi developmentalisme orde baru, yang memproyeksikan pembangunan sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan tanpa mempertimbangkan alternatif atau efek yang ditimbulkan. Sedangkan masyarakat yang mendengarkan pidato, dengan berbagai ekspresi pasif mendukung proyek pembangunan mencerminkan posisi kelas yang subordinat. Surat ibu Agus memperlihatkan resistensi pasif terhadap dominasi kekuasaan namun tidak secara langsung menantangnya, melainkan mengungkapkan harapan dan doa agar pemimpin mendengarkan aspirasi mereka.

Dialog ini menguatkan temuan dalam penelitian tentang relasi sipil-militer, di mana narasi visual dan verbal digunakan untuk menciptakan persepsi harmonis tetapi pada saat yang sama memperkuat struktur kekuasaan yang menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak *dependensi*. Visualisasi dalam gambar yang menampilkan Purna berdiri di depan audiens menegaskan kekuasaan simbolik yang ia miliki. Sementara itu, Agus, sebagai perwakilan suara sipil dengan gestur formal dan penuh harapan mencerminkan sikap ketergantungan masyarakat pada keputusan pemimpin. Surat ibu Agus tersebut memperlihatkan resistensi pasif terhadap dominasi kekuasaan namun tidak secara langsung menantangnya, melainkan mengungkapkan harapan dan doa agar pemimpin mendengarkan aspirasi mereka. Adegan ini menyampaikan kritik implisit terhadap ketimpangan dalam relasi tersebut yang menjadi fokus penting dalam diskursus representasi kekuasaan militer.



Gambar 4. (25:56 – 26:59) *scene* Purna membesuk Amir (Ayah Rakib) di penjara, dari Data Olahan Peneliti, 2024

- Purna : “Aku sudah dengar berita tentang kamu, tapi aku mau dengar langsung dari kamu.”
Amir : “Apa yang bapak dengar?”
Purna : “Kamu *memereteli* traktor pemborong, mencuri aki. Tapi kenapa”
Amir : “Mereka memaksa mengambil alih kebun saya. Saya pikir kalau traktornya rusak itu bakalan ditunda.”
Purna : “Kamu kan bisa ngomong sama aku kalau butuh sesuatu.”

Adegan dalam *scene* di atas memanfaatkan elemen visual yang menggambarkan konsekuensi dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang diwakili oleh Amir (Ayah kandung Rakib). Latar penjara dengan jeruji besi menciptakan metafora tentang pembatasan kebebasan fisik dan konsekuensi yang akan didapatkan bila bertindak subversif. Gambar tersebut mencerminkan subordinasi individu terhadap kekuasaan yang lebih besar. Posisi Purna di luar jeruji dan Amir di dalam jeruji menggarisbawahi ketimpangan kekuasaan dalam hubungan mereka, di mana Purna hadir sebagai figur otoritas sementara Amir terkurung dalam buah tindakan yang dilakukan.

Dalam dialog disini, memperlihatkan sedemikian besar dan kuatnya hegemoni kultural orde baru sehingga warisan ideologi militerisme masih mengakar dalam iklim demokratis. Irawanto (2017) menjelaskan bahwa di bidang politik pasca reformasi, peran militer cacat secara politik tetapi *playing field* mereka di bidang lain masih signifikan terutama membentuk *mindset* dan psikologis publik. Kekuatan militeristik Purna berusaha

mentransmisikan konsep ketergantungan pihak sipil demi menjaga stabilitas dan *menderadikalisasi* masyarakat. Ketika Amir merusak traktor sebagai bentuk perlawanan terhadap *developer* yang mengambilalih kebunnya, tindakannya menjadi simbol resistensi pasif terhadap struktur kekuasaan yang represif. Di sisi lain, Purna, dengan ekspresi wajah yang lebih serius mewakili kekuasaan yang mencoba memanipulasi situasi melalui dialog persuasif.

Asosiasi penjara dalam *scene* ini memperkuat aspek keterkungkungan, baik secara fisik maupun psikis. Jeruji tersebut tidak hanya membatasi Amir secara individu akan tetapi menjadi simbol ketidakmampuan masyarakat kecil untuk melawan sistem yang lebih besar. Dialog tersebut menggambarkan jalinan kompleksitas hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, di mana resistensi masyarakat sering kali dihadapkan pada dominasi kekuasaan yang mencoba mengontrol narasi dan tindakan. Dengan demikian, melalui dialog yang emosional tersebut ingin menegaskan bahwa film dapat menjadi medium untuk mengeksplorasi ketegangan sosial-politik melalui sudut pandang yang lebih mikro.

Representasi Hubungan Sipil-Militer Pasca-Orde Baru



Gambar 5. (35:00 – 35:32) *scene* Purna menemukan spanduk dirinya dirusak orang dan menyuruh Rakib mencari pelaku pengrusakan, dari Data Olahan Peneliti, 2024

Dalam *scene* disini, Purna turun dari mobil dan melihat spanduk dirinya sebagai calon bupati dirusak oleh orang tidak dikenal. Peneliti menganalisis bahwa perusakan ini dilakukan oleh Agus, pemuda SMA yang juga jadi montir bengkel di rumahnya sendiri. Peristiwa ini sebagai simbol perlawanan terhadap Purna yang dilakukan oleh generasi muda yang tumbuh besar di era pasca reformasi. Kejadian ini disebabkan bahwa Purna akan mengusir kebun kopi orang tua Agus atas nama proyek pembangunan.

Terminologi pembangunan sangat populer digunakan oleh para calon kepala daerah sejak periode orde baru dan pasca orde baru. Untuk melacak ke belakang terkait benang merah realitas historisnya, ketika Jenderal M. Jusuf diangkat oleh Soeharto menjadi menteri pertahanan dan keamanan, pada tahun 1980 militer meluncurkan Program ABRI Masuk Desa, disingkat AMD. Program populis ini bertujuan membangun desa, kontrol sosial dan melegitimasi kepentingan jangka panjang kekuasaan politik rezim militerisme (Dispenad, 1988).

Bentuk resistensi ini mengcounter politik memori kekuasaan Purna (militer) yang dominan dalam kehidupan sipil pedesaan kontemporer dan Agus (sipil) direpresentasikan

sebagai generasi muda yang menolak dampak militerisasi tersebut kendati masih bersifat individualistis. Gambar ini juga menghadirkan perusakan spanduk sebagai tindakan simbolis yang mencerminkan perlawanan terhadap otoritas yang dianggap tidak adil. Visual pertama memperlihatkan Purna yang menatap spanduk rusak dengan ekspresi serius, mencerminkan kesadaran akan adanya resistensi terhadap dirinya. Gambar kedua menunjukkan spanduk yang tergeletak di tepi selokan. Dua visual ini menegaskan kontras antara citra kekuasaan yang ingin ditampilkan oleh Purna melalui spanduk kampanyenya dan realitas penolakan yang diterimanya dari masyarakat lokal, terutama generasi muda seperti Agus.

Jika dianalisis melalui kerangka *the codes of television* John Fiske, *scene* disini menggambarkan aspek medium visual (spanduk) digunakan sebagai alat komunikasi massa yang ideal dan representatif untuk memperlihatkan pengaruh besar dan ketenaran yang dimiliki oleh Purna. Namun, tindakan Agus merusak spanduk Purna menyiratkan bentuk subversif yang ingin menantang status quo politik. Pada tingkat realitas, tindakan ini adalah perlawanan konkret terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap merugikan. Dan pada tingkat representasi, aksi ini merepresentasikan konflik antara otoritas penguasa dan suara masyarakat yang termarginalkan. Sementara itu, pada tingkatan ideologi, peristiwa ini mengungkapkan bahwa legitimasi kekuasaan yang dicitrakan dengan memasang spanduk acapkali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Agus, sebagai manifestasi generasi muda yang kritis dalam era pasca orde baru menggunakan tindakan sederhana namun politis ini untuk menginterupsi kekuasaan yang mendominasi di ruang publik dan juga memperlihatkan konflik tersembunyi antara otoritas dan masyarakat kecil.



Gambar 6. (01:20:35 – 01:22:25), *scene* ekspresi *calo* ketakutan dan Rakib diangkut ke dalam mobil tentara, dari Data Olahan Peneliti, 2024

Pada gambar 6 di atas, Setelah Rakib mengalami tekanan psikologis akibat kekerasan fisik yang dilakukan Purna kepada Agus sehingga membuat Agus meninggal di rumah sakit. Dengan tergesa-gesa Rakib memutuskan pergi dari rumah Purna untuk merantau ke Singapura. Tidak berselang lama, beberapa tentara ditugaskan Purna mencari Rakib di terminal.

Beberapa tentara menginspeksi keberadaan Rakib di atas bus dan komandan mereka mengambil posisi duduk di samping *calo* tenaga kerja.

Tentara: “Kamu orang baik bukan?”

Calo : “Iya Pak”

Tentara: “Ya bukanlah, saya tahu kok orang-orang ini akan kamu bawa kemana. Kamu kenal anak ini?”

Lantas komandan tentara tersebut memperlihatkan foto Rakib di layar ponselnya. Walaupun Rakib (sipil) berupaya menggunting relasi kuasanya dengan Purna (militer) dengan melarikan diri, cepat atau lambat, dia akan ditemukan oleh militer dimanapun keberadaannya. Pengawasan (*Surveillance*) militer atau intelijen terhadap gerak-gerik masyarakat sipil sehari-hari adalah bentuk kontrol yang bukan datang secara tiba-tiba. Secara tersirat, ini juga memperlihatkan rantai komando dan intervensi militer terhadap aktivitas sipil masih kuat di iklim demokrasi dan kadangkala melampaui fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

Dialog antara tentara dan calo semakin memperjelas ketimpangan relasi kekuasaan antara hubungan sipil-militer. Pertanyaan seperti “Kamu orang baik bukan?” dan “Kamu kenal anak ini?” bukan hanya bentuk interogasi tetapi juga upaya intimidatif yang menempatkan *calo* dalam posisi subordinat. Tentara menggunakan kekuatan simboliknya untuk menekan individu sipil agar tunduk, hal demikian mencerminkan bagaimana institusi militer sering kali melampaui fungsinya sebagai kelompok yang melakukan pengawasan dan mengontrol aktifitas individu sipil. Dalam konteks penelitian ini, *calo* menjadi simbol masyarakat sipil yang rentan terhadap pengaruh koersif militer yang kerap digunakan untuk memenuhi agenda pribadi seperti upaya Purna untuk menemukan Rakib.

Pada umumnya, sistem intelijen militer tidak hanya memasang mata dan telinga dalam kehidupan sehari-hari kaum sipil namun juga mampu melakukan pengawasan terhadap rakyat luas (Susanto & Supriatma, 1995). Semenjak reformasi bergulir, kekuatan politik militer berhasil dihapuskan secara resmi akan tetapi pengaruhnya belum sepenuhnya sirna. Warisan militerisme ini dapat dijumpai dalam kehidupan sosial dan budaya populer masyarakat Indonesia kekinian. Kontrol militer atas sipil yang dialami Rakib berkelindan dengan pola-pola intelijen militer pada umumnya dalam mengawasi gerak-gerik masyarakat.



Gambar 7. (01:43:45 – 01:43:59), *scene* Rakib mendengar perbincangan polisi dari dalam dapur, dari Data Olahan Peneliti, 2024

Ketika ambulance tiba membawa jenazah Purna yang mati ditangan Rakib di kebun. Rakib menggunakan senjata laras panjang milik Purna, tak ada saksi yang melihat peristiwa tersebut kecuali Purna dan Rakib sendiri. *Scene* kamera disini menyoroti Rakib yang mendengar dari jauh perbincangan Soewito (Kapolsek) dan anggota polisi bawahannya.

Anggota Polisi: “Ada empat orang pak yang kita tahan dikantor.”

Soewito : “Kamu kenal?”

Anggota Polisi: “Mereka bilang, mereka pemburu. Bukan orang sini pak.”

Perbincangan disini menjelaskan bahwa Rakib tidak dicurigai sedikitpun oleh polisi perihal kematian majikannya itu. Sama halnya ketika Agus mati di tangan Purna, tak seorang pun melihat kecuali mereka berdua. Dapat ditafsirkan, Polisi maupun masyarakat memperlihatkan secara tidak langsung nilai *inferiority complex* yang mereka pegang terhadap superioritas militer. Purna berhasil mentransmisikan warisan militerisme kepada pemuda bernama Rakib, dan Rakib mempraktikkan tindakan-tindakan kekerasan majikannya secara diam-diam dan senyap. Secara ideologis, film ini menyajikan kritik mendalam terhadap warisan politik militerisasi yang terus membayangi periode pasca reformasi meskipun orde baru telah berlalu.

Pengaruh militer yang mapan sejak orde baru dan periode setelah reformasi berasal dari jaringan teritorialnya yang membentang di seluruh negeri (Crouch, 2010). Karakter Purna sebagai mantan jenderal angkatan darat merepresentasikan hal tersebut di kampung halamannya yang terletak di pedesaan. Film dapat menjadi medium pendukung untuk menggali warisan politik masa lalu dan menawarkan kritik terhadap pengaruh militerisme yang bertahan dalam ruang publik. Apa yang disajikan “Autobiography” pada hakikatnya mencerminkan konflik antara generasi muda dengan simbol-simbol kekuasaan lama yang dominan di era pasca orde baru. Melalui kerangka teori John Fiske, ditemukan pengeksplorasi hal-hal baru dalam merepresentasikan dampak dominasi militer di tiga tingkatan dan temuan peneliti berupaya memberikan wacana baru tentang sinema sebagai alat untuk refleksi sosial-politik dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.

PENUTUP

Dalam analisis pada Film “Autobiography” berdurasi 1 jam 54 menit, Peneliti menemukan ketimpangan kuasa dalam hubungan sipil-militer pasca orde baru. Warisan politik dan kebudayaan militer memengaruhi struktur sosial politik masyarakat. Hasil penelitian, ditemukan bahwa film ini mampu mengungkap ketegangan antara subordinasi dan resistensi dalam hubungan sipil-militer. Pada tingkat realitas, simbol seragam militer, senjata, dan teknik visualisasi warna digunakan untuk menciptakan atmosfer ketegangan dan emosional. Pada tingkat representasi, narasi film menunjukkan bagaimana figur otoriter seperti Purna menggunakan kekuasaannya untuk menindas individu sipil sementara karakter Rakib menjadi simbol resistensi terhadap dominasi tersebut. Pada tingkat ideologi, film ini mengkritik warisan militerisme yang masih memengaruhi kehidupan sosial-politik bahkan setelah rezim orde baru berakhir dimana warisan masa lalu berhasil menciptakan trauma kolektif yang bertahan lama. Temuan secara signifikan berfungsi sebagai kritik terhadap

wacana militerisme di Indonesia dan juga menjadi refleksi universal tentang dampak otoritarianisme pada masyarakat masa kini.

Film ini juga menunjukkan bahwa otoritarianisme bukan hanya masalah struktural atau politik tetapi telah menjadi budaya yang merasuki hubungan interpersonal dan psikologis individu. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu tidak secara langsung membahas respons audiens terhadap representasi dalam film sehingga perspektif penerimaan penonton belum dieksplorasi lebih mendalam. Untuk penelitian ke depan, disarankan agar analisis diperluas ke film-film lain yang merepresentasikan hubungan sipil - militer sehingga memungkinkan komparasi yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memperkaya diskursus dengan tema serupa dan membaca sinema sebagai alat refleksi penyadaran sosial dan politik.

REFERENSI

- Althusser, L. (2015). Ideologi dan aparatus ideologi negara (catatan-catatan investigasi). *IndoPROGRESS*.
- Ashrianto, P. D. (2016). Analisis Semiotika Film Janur Kuning sebagai Representasi Ideologi Kekuasaan Soeharto. *Nirmana*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.9744/nirmana.16.1.1-11>
- asumsi.co. (2023). “Autobiography”, *Bukti Manusia Bisa Lebih Seram Daripada Setan*. <https://asumsi.co/post/76987/autobiography-bukti-manusia-bisa-lebih-seram-daripada-setan/>
- Budiman, H. G. (2018). Representasi Tentara dan Relasi Sipil-Militer dalam Serial Patriot. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i1.332>
- Budiman, H. G., Priyatna, A. P., & Mulyadi, R. M. (2019). Maskulinitas Tentara dalam Sinema Pasca Orde Baru; Analisis Naratif Doea Tanda Cinta (2015) dan I Leave My Heart in Lebanon (2016). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i1.483>
- Budiman, H. G., & Sofianto, K. (2018). *Representasi Sipil-Militer dan Konstruksi Maskulinitas pada Film Jenderal Soedirman (2015)*. 1987. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i2.220>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Crouch, H. (2010). Political Reform In Indonesia After Soeharto. *ISEAS Publishing*.
- deadline.com. (2023). ‘Autobiography’ Director Makbul Mubarak Says Indonesia’s Oscar Entry Is “About Loyalty And Legacy” – *Contenders International*. <https://deadline.com/2023/12/autobiography-makbul-mubarak-interview-indonesia-oscar-1235659318/>
- Dispenad. (1988). *Sewindu TNI-ABRI Masuk Desa 1980-1988*.
- Fanani, F. (2013). Semiotika Strukturalisme Saussure. *Jurnal The Messenger*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v5i1.149>
- Fiske, J. (1987). Television culture: popular pleasures and politics. In *Television Culture*. Methuen & Co. Ltd. <https://doi.org/10.4324/9780203837153-21>
- Fiske, J. (2004). *Cultural and Communcation Studies* (I. S. Idi (ed.)). Jelasutra.
- Fiske, J. (2005). *Cultural Studies*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203988466>

- Irawanto, B. (2017). *Film, Ideologi, & Militer: Hegemoni militer dalam sinema Indonesia : analisis semiotik terhadap Enam Djam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar*. Warning Books.
- Irawanto, B. (2020). Spectacularity of Nationalism: War, Propaganda and Military in Indonesian Cinema during the New Order Era. In *Cambridge University Press*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9789048541904.007>
- Mudjiono, Y. (2011). Kajian semiotika dalam film. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 125–138.
- Nafisha, M., Masrur, D., Iffa, N., Jannah, N., Mahardika, R., & Ramsaukasa, B. (2023). Representasi Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Menutupi Sebuah Kasus Pada Film Autobiography. *Prosiding Seminar Nasional*, 888–905.
- Sobur, A. (2017). Semiotika komunikasi. *Remaja Karya*.
- Susanto, B., & Supriatma, A. M. T. (1995). ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995 (Cultural Deception of ABRI 1945-1995). Yogyakarta: *Penerbit Kanisius, Lembaga Studi Realino*.
- Turner, G. (2022). John Fiske and the building of cultural studies. *International Journal of Cultural Studies*, 25(1), 3–13.
- Yuliastuti, D. (2023). Representasi Kekuasaan dan Kekerasan dalam Film Autobiography Karya Sutradara Makbul Mubarak dalam Perspektif Roland *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(07), 1–9.
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/938>